ARINI WIJAYANTI, S.H., M.H.

Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat (Plt)

RELIGI
AKUNTAB
EPROFESION
INTEGRIT
AS

VISI MISI dan STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

VISI

"MENJADI SEKRETARIAT JENDERAL YANG PROFESIONAL DAN MODERN DALAM MENDUKUNG VISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA"

MISI

1. Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
3. Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia.

STRUKTUR ORGANISASI

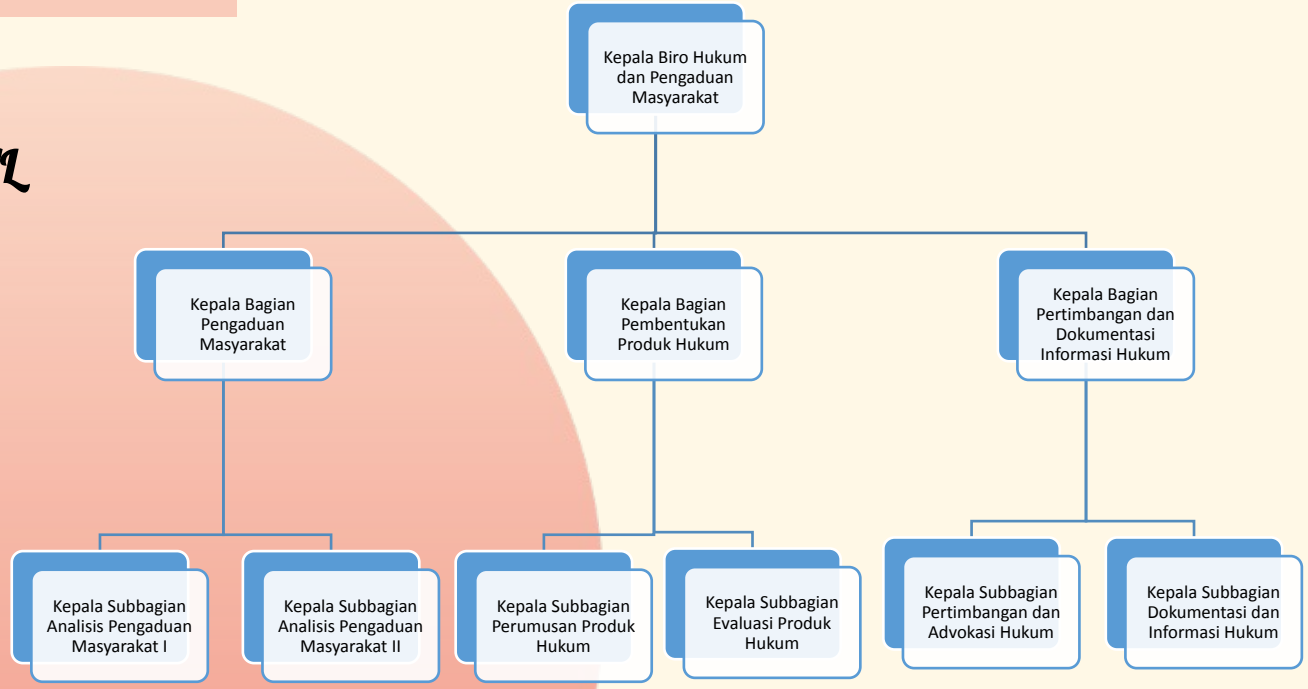

BIRO HUKUM &
PENGADUAN MASYARAKAT

AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN

SEBELUM ZI

Belum konsisten menerapkan nilai organisasi "**RAPI**"

SESUDAH ZI

Upaya BIRO HUKUM DAN DUMAS dalam mengubah mind set dan budaya organisasi memiliki budaya kerja yang bersih & melayani

KOMITMEN PIMPINAN

PENCANANGAN ZI

PEMBINAAN

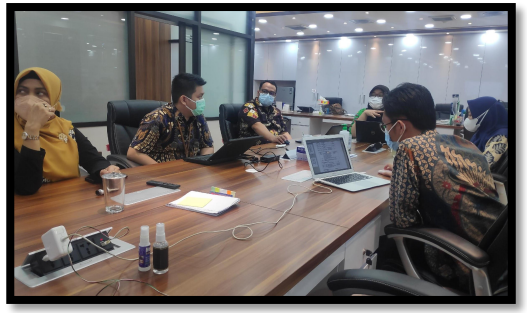

RAPAT TIM KERJA

MONITORING & EVALUASI

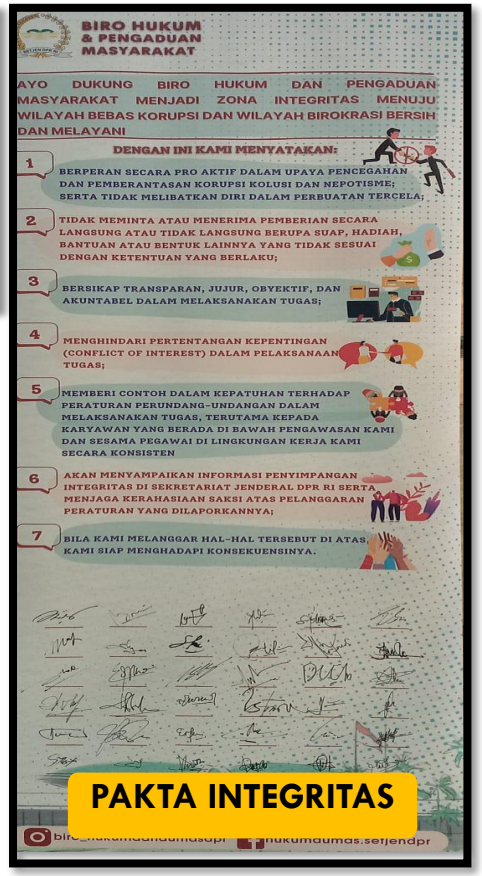

PAKTA INTEGRITAS

ANJUTAN

BIRO HUKUM &
PENGADUAN MASYARAKAT

AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN

SESUDAH ZI

Upaya BIRO HUKUM DAN DUMAS dalam merubah mind set & budaya organisasi memiliki budaya kerja yang bersih & melayani

PERUBAHAN POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA

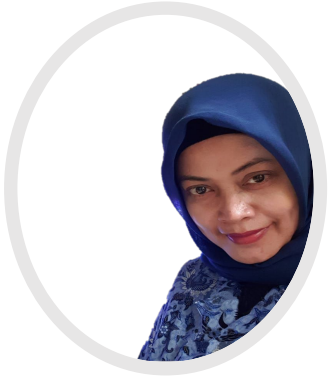

ROLE MODEL

AGEN PERUBAHAN

DOA PAGI

SEBELUM ZI

POLA PIKIR & BUDAYA KERJA MASIH RENDAH

NASIONALISME

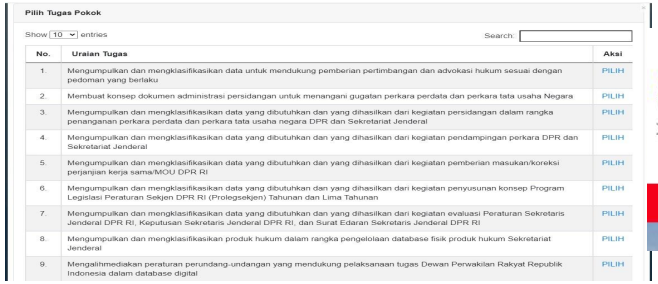

CATATAN HARIAN

CAMPAIGN MLL RUNNING TEXT SIDUMAS

BIRO HUKUM &
PENGADUAN MASYARAKAT

AREA 2 PENATAAN TATALAKSANA

SESUDAH ZI

Upaya BIRO HUKUM DAN DUMAS dalam mengatur tata kerja untuk meningkatkan efisiensi kerja

SISTEM KERJA DENGAN SOP DAN CORE BISNIS

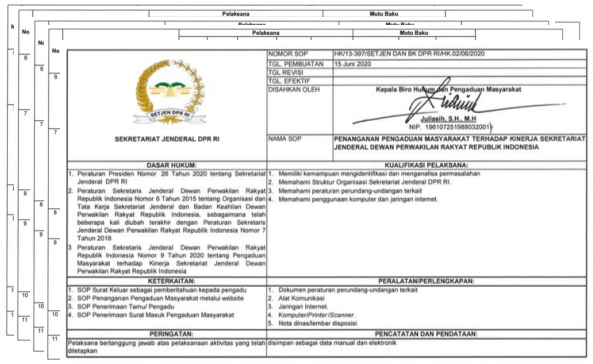

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI	NOMOR SOP: HK/13-397/SETJEN DAN BK DPR RI/HK.02/06/2020 TGL. PEMBUATAN: 15 Juni 2020 TGL. REVISI: TGL. EFEKTIF: DISAHKAN OLEH: Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Julaesh, S.H., M.H NIP. 196107251988032001
	NAMA SOP: PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DASAR HUKUM: 1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI 2. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 3. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengaduan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan 2. Memahami Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI. 3. Memahami peraturan perundang-undangan terkait 4. Memahami penggunaan komputer dan jaringan internet.
KETERKAITAN: 1. SOP Surat Keluar sebagai pemberitahuan kepada pengadu 2. SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui website 3. SOP Penerimaan Tamu/ Pengadu 4. SOP Penerimaan Surat Masuk Pengaduan Masyarakat	PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Dokumen peraturan perundang-undangan terkait 2. Alat Komunikasi 3. Jaringan Internet. 4. Komputer/Printer/Scanner. 5. Nota dinas/lembar disposisi
PERINGATAN: Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan	PENCATATAN DAN PENDATAAN: disimpan sebagai data manual dan elektronik

SOP PELAKSANAAN TUGAS FUNGSI BIRO HUKUM & DUMAS

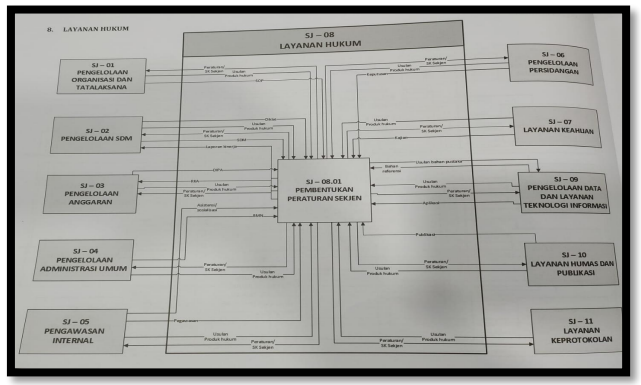

PETA PROSES BISNIS

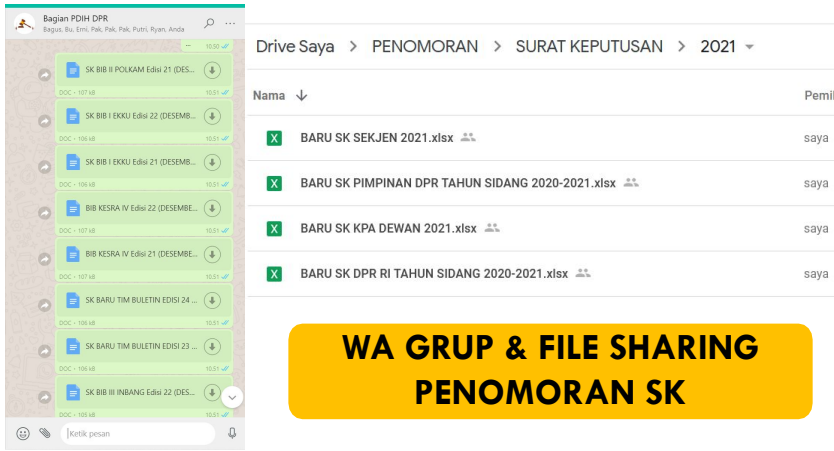

WA GRUP & FILE SHARING PENOMORAN SK

EVALUASI PROBIS DAN SOP

SEBELUM ZI

PENATAAN TATA LAKSANA BELUM EFISIEN

LANJUTAN

BIRO HUKUM & PENGADUAN MASYARAKAT

AREA 2 PENATAAN TATALAKSANA

SESUDAH ZI

Upaya BIRO HUKUM DAN DUMAS dalam mengatur tata kerja untuk meningkatkan efisiensi kerja

PEMANFAATAN IT & INOVASI untuk mempercepat proses & mencegah KKN

Responsive Layout

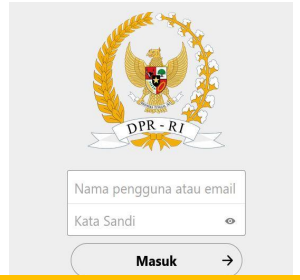

Database Perkara/CLOUD DPR

Drive (Persekjen)

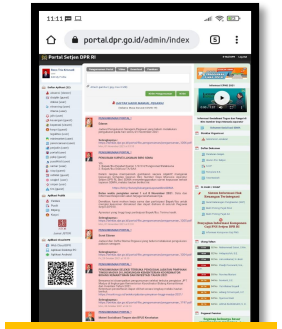

Portal DPR RI

KETERBUKAAN INFORMASI

JDIH Setjen DPR

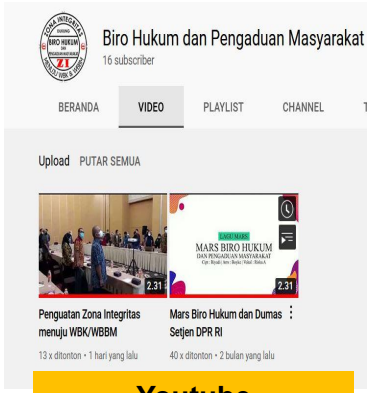

Youtube

https://www.youtube.com/channel/UC6kX6_knNS-RtlRbDk0sfVw

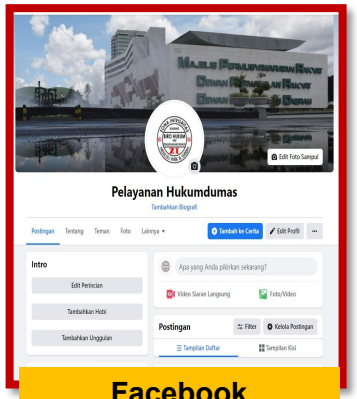

Facebook

https://www.facebook.com/hukumdumas.setjendpr

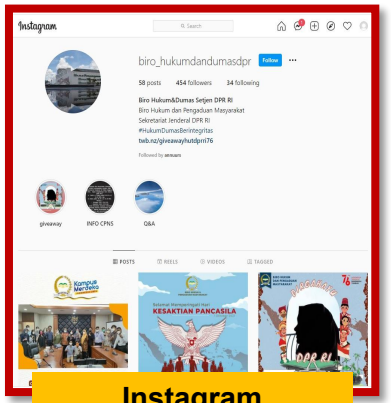

Instagram

https://instagram.com/biro_hukumdandumasdpr?utm_medium=copy_link

SEBELUM ZI

SISTEM KERJA MASIH MANUAL, LAMBAT DAN TIDAK MUDAH DIAKSES

BIRO HUKUM &
PENGADUAN MASYARAKAT

AREA 3 PENATAAN MANAJEMEN SDM

SESUDAH ZI

Upaya BIRO HUKUM DAN DUMAS dalam mengelola SDM & terus menerus meningkatkan profesionalisme & integritas SDM. Integritas adalah tools pencegah KKN.

TATA KELOLA ADM. KEPEGAWAIAN YANG BAIK

BRIEFING

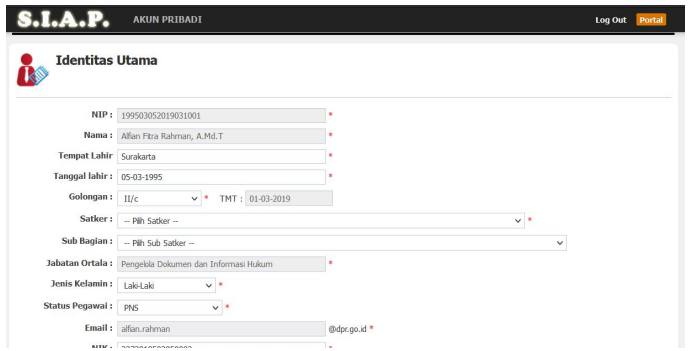

APLIKASI "SIAP"

ABSENSI ONLINE

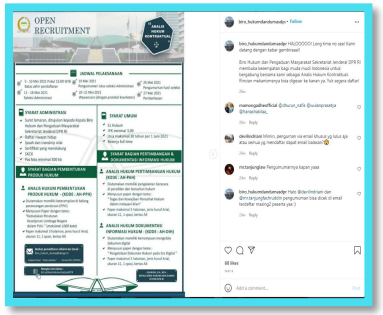

KETERBUKAAN PENERIMAAN PPNPN

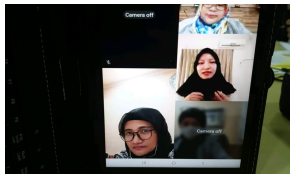

SELEKSI TENAGA PPNPN

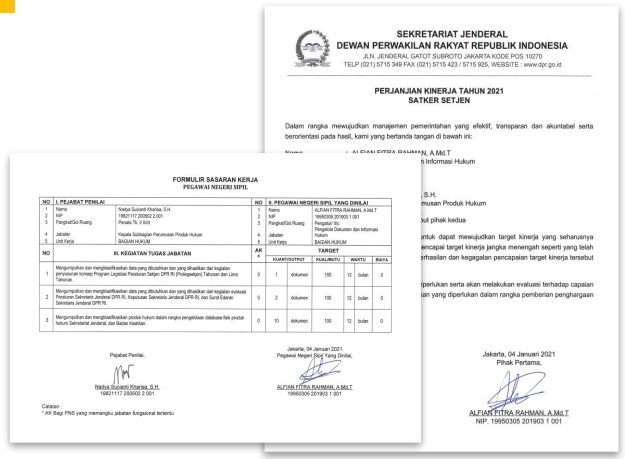

PENETAPAN KINERJA INDIVIDU

SEBELUM ZI

PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN BELUM OPTIMAL

LANJUTAN

BIRO HUKUM & PENGADUAN MASYARAKAT

AREA 3 PENATAAN MANAJEMEN SDM

SESUDAH ZI

PENINGKATAN PROFESIONALISME DAN INTEGRITAS

BIMBINGAN TEKNIS JDIHN

WORKSHOP BPIP

DISKUSI PAKAR

PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS NEGOSIASI DAN MEDIASI

SEBELUM ZI

SDM **BELUM** PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS TINGGI

PENINGKATAN KOMPETENSI ANALIS DUMAS

ESQ

SHARING KNOWLEDGE

BIRO HUKUM &
PENGADUAN MASYARAKAT

AREA 4 PENGUATAN AKUNTABILITAS

SESUDAH ZI

Upaya BIRO HUKUM DAN DUMAS dalam meningkatkan Akuntabilitas Sumber Daya untuk optimalisasi Capaian Kinerja

KETERLIBATAN PIMPINAN DALAM

RAPAT PENYUSUNAN SAKIP

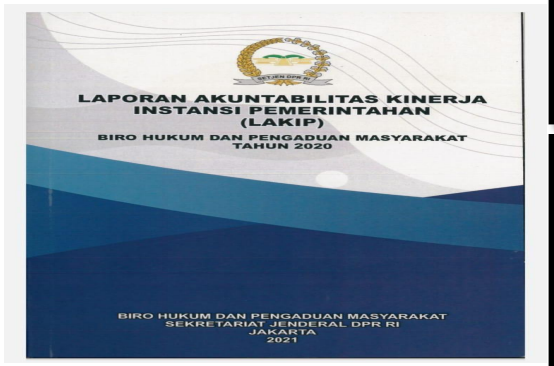

SAKIP THN 2020

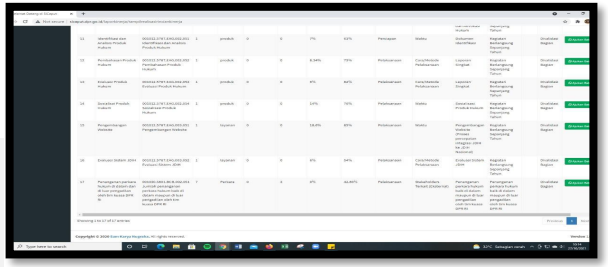

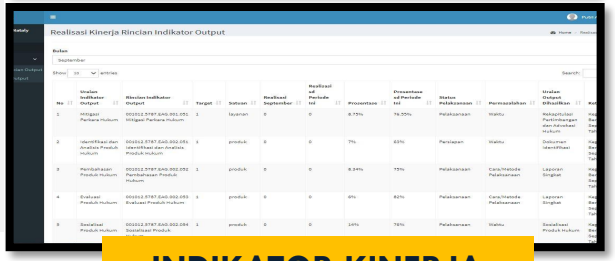

INDIKATOR KINERJA SMART

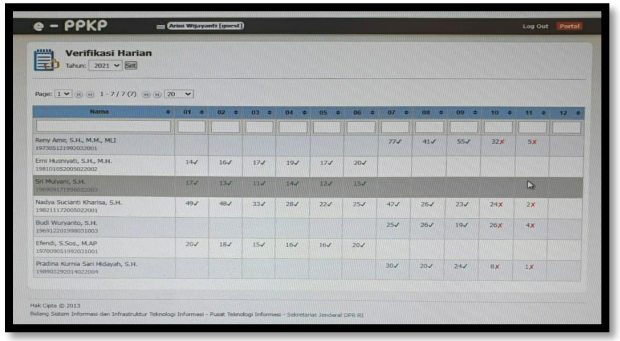

VERIFIKASI CATATAN HARIAN

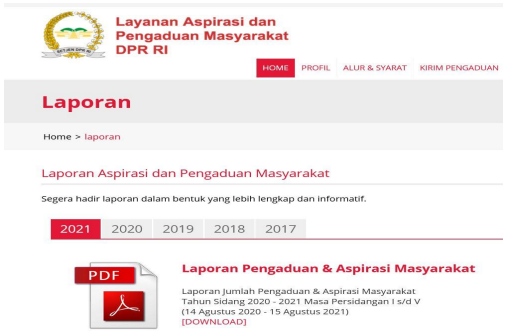

LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT

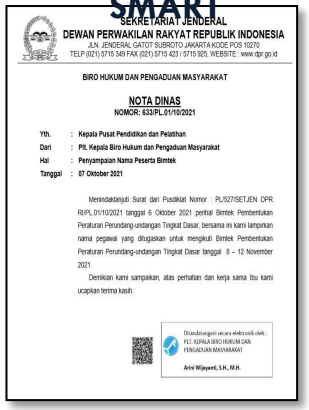

TANDATANGAN ELEKTRONIK

SEBELUM ZI

PIMPINAN BELUM TERLIBAT LANGSUNG DALAM PENYUSUNAN SAKIP & PROGRAM BELUM BERORIENTASI HASIL

BIRO HUKUM &
PENGADUAN MASYARAKAT

AREA5 PENGUATAN PENGAWASAN

SESUDAH ZI

Upaya BIRO HUKUM DAN DUMAS dlm memastikan seluruh anggota unit kerja, melaksanakan tugas sesuai dgn aturan & bebas penyimpangan (Kalau Pengawasannya berjalan baik, maka KKN pun tertutup)

EFEKTIVITAS PENGENDALIAN

PELAPORAN LHKPN DAN LHKASN

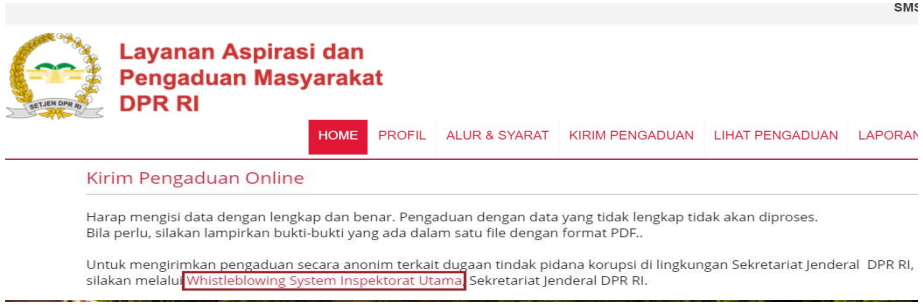

PENGELOLAAN PENGADUAN DENGAN APLIKASI SIDUMAS YANG TERINTEGRASI DENGAN WBS ITTAMA SETJEN DPR RI

SOSIALISASI ANTI GRATIFIKASI

CAMPAIGN ANTI GRATIFIKASI

PELAKSANAAN SPIP

STOP
GRATIFIKASI
Dilarangan Menerima Dan Memberi Gratifikasi
Dalam Bentuk Apapun

SEBELUM ZI

BELUM ADA TINDAKAN PENGENDALIAN
&
BELUM ADA BATASAN AKSES PELAYANAN DAN MONITORING

BIRO HUKUM &
PENGADUAN MASYARAKAT

AREA 6 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

SESUDAH ZI

Upaya BIRO HUKUM DAN DUMAS dalam meningkatkan PELAYANAN PUBLIK dengan inovasi menjadi lebih mudah, lebih murah & lebih cepat

SEBELUM ZI

PELAYANAN MASIH **MANUAL** / STANDAR

EFEKTIFITAS PELAYANAN

Launching & sosialisasi aplikasi Sidumas.

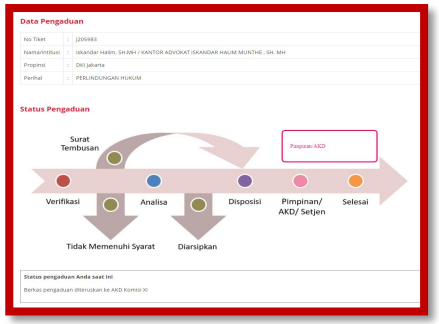

Railway Dumas

Pelayanan Prima/Pengaduan 1 Pintu

Koordinasi Pengelolaan

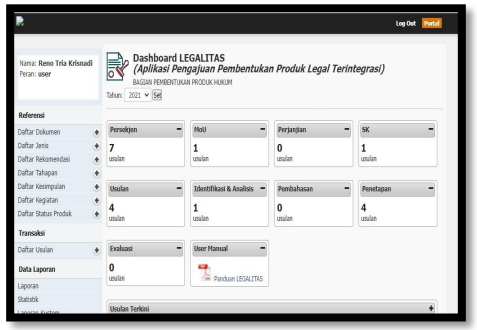

Aplikasi LEGALITAS

Kampus Merdeka

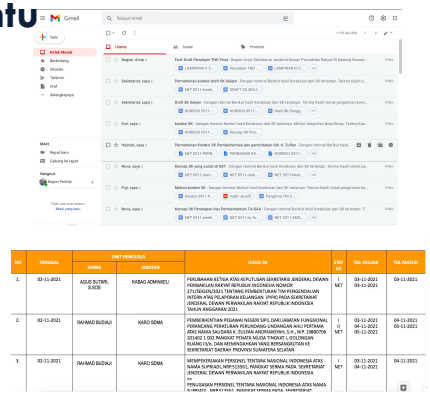

First In First Out

KOLOM INOVASI

NO	NAMA INOVASI	TUJUAN	MENDUKUNG AREA
1	Aplikasi SIDUMAS *(Sebagai Produk Unggulan)*	menghindari interaksi pengadu dengan pengelola pengaduan dengan demikian mencegah adanya gratifikasi, korupsi, kolusi	1 sampai 6
2	Aplikasi JDIH Terintegrasi	untuk memberikan informasi hukum kepada masyarakat, untuk menghindari interaksi langsung dengan publik, hal ini untuk menghindari adanya gratifikasi dan kolusi	2 dan 6
3	Aplikasi Legalitas	Untuk mempercepat dan memudahkan proses korespondensi pembentukan produk hukum	2 dan 6
4	FIFO Koreksi SK Online (*Paperless*)	Menghindari Praktek Kolusi	2 dan 6
5	Tata Kelola Administrasi via Drive	Memudahkan tata laksana	2 dan 5
6	Whatsapp Grup Untuk Kinerja WFH	untuk meningkatkan produktifitas pegawai di masa pandemi, sebagai wujud akuntabilitas kinerja pegawai	2 dan 4
7	Penomoran SK secara file sharing	untuk memudahkan dan mempercepat layanan penomoran dan menghindari interaksi langsung yang memungkinkan terjadinya gratifikasi, kolusi dan nepotisme	2 dan 6
8	Digitalisasi Berkas Perkara	Mendukung tata laksana	2 dan 5
9	Aplikasi SIRAJIN	Meningkatkan Integritas dan Profesionalisme	1, 2,3, 4 dan 5
10	Aplikasi Tandatangan digital E-Sign	menghindari adanya pemalsuan dan mempercepat dan mempermudah pelayanan	2 dan 5

PRESTASI

REWARD KARYA TULIS
EDI LEO

TESTIMONIALS

"Saya mengapresiasi Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat dalam menjaring pengaduan dan aspirasi ke berbagai daerah di seluruh Indonesia

***Deby Riyanti**
Universitas Muhammadiyah Jakarta

"Saya menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Setjen DPR RI dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat"

***Zamzamia Rizka**
Universitas Muhammadiyah Jakarta

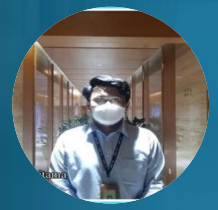

"Saya mengapresiasi kinerja di Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Setjen DPR RI dalam memberikan pelayanan ke masyarakat dalam menyalurkan aspirasi dan pengaduan ke DPR RI"

***Alvin Satrya Adhitama**
Universitas Trisakti

Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.
(Ketua Komisi II DPR RI)

"Saya kira itu hal yang positif dan perlu kita dukung artinya ini Setjen semakin terbuka terhadap masukan kritik dan saran baik internal dari anggota Dewan atau pegawai dan yang paling penting dari masyarakat ini semakin menjamin bahwa interaksi institusi semakin kuat dengan masyarakat dan anggota Dewan, oleh karenanya ini baik dan harus didukung, diharapkan proses untuk menganalisis setiap pengaduan yang masuk kemudian tindaklanjutnya seperti apa, jadi yang pertama harus diperkuat dari seluruh masukan dari masyarakat ada satu tahapan atau tim yang bekerja untuk betul-betul menganalisis, respon dan rekomendasi seperti apa yang harus ditindaklanjuti atas masukan."

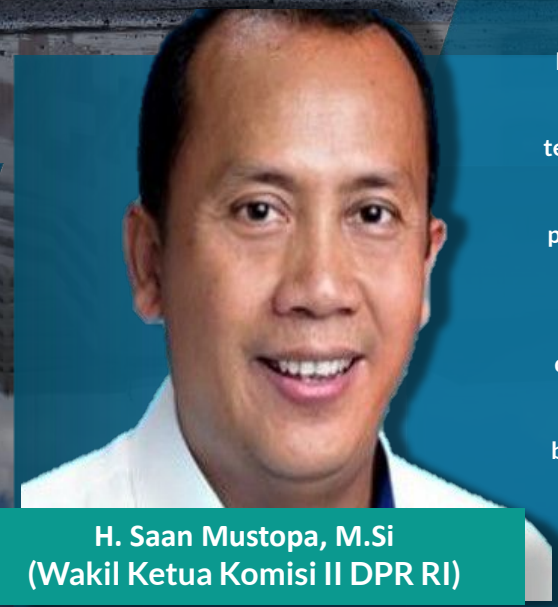

H. Saan Mustopa, M.Si
(Wakil Ketua Komisi II DPR RI)

"Reformasi Birokrasi sebuah keharusan untuk dilakukan di semua level birokrasi, yang pertama untuk memudahkan pelayanan, yang kedua untuk meningkatkan kinerja PNS, Reformasi Birokrasi juga tentu menjadi sebuah ukuran dari PNS kedepan nanti terkait dengan reward. Apa yang sedang digagas oleh Kesetjenan terkait dengan pendataan pengaduan itu menjadi penting karena memeng problem kita dari dulu sampai sekarang adalah menyangkut tentang administrasi hal yang sepele kadang kita abai, pengaduan harus dibuka secara transparan dan memberi ruang pengaduan memang harus dibuka oleh Kesetjenan, hal ini penting dan kedepannya bagaimana menindaklanjuti adalah hal terpenting terhadap sebuah pengaduan, jadi jangan dibuka ruang pengaduan tetapi tindak lanjutnya tidak ada, yang penting juga pengaduan harus ditindaklanjuti dengan cepat, jadi jangan dibiarkan berlama-lama diendapkan tetapi harus cepat untuk direspon."

TERIMAKASIH KAMI UCAPKAN
KEPADA TIM PENILAI NASIONAL KEMENPAN RB

KAMI SIAP MENJADI WBK/WBBM

“ Elok dipetik bunga melati
Riasan Pengantin si gadis sejati
Kepada stakeholder kami Berjanji
Melayani dengan EMPATI ”

“ Cantik rupa melati dikemas
Petik yang segar untuk pujaan hati
Segala usaha kami di Biro Hukum dan Dumas
Semogalah dapat menghantar lolos ZI ”